

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2017-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN
2017-2021**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

ISSN : 2620-4401
Nomor Publikasi : 35000.2209
Katalog BPS : 9302023.35

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 78 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Tata Letak dan Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dicetak Oleh :
PT. Sinar Murni Indo Printing

Sumber Ilustrasi :
www.vecteezy.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab:

Khaerul Agus, S.Si, M.M

Penyunting Naskah:

Debora Sulistya Rini, M.Si

Riena Widianingtyas, S.Si, M.T

Penulis Naskah:

Haryono, SST

Aldizah Dajustia Hutami, SST, M.SE.

Desain Gambar Kulit:

Haryono, SST

Tata Letak:

Haryono, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas tentang PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

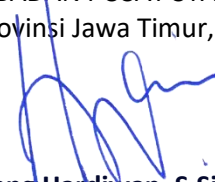
Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, April 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Timur,



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Kegunaan Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori.....	21
2.6 Ekspor Impor.....	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017-2021.....	27
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Timur Menurut Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	38
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	42
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	44
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	45
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	47
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah.....	49
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017-2021	51
4.1 PDRB (Nominal)	53

4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	54
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB.....	55
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	55
4.5	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB.....	56
4.6	Perbandingan PDRB Terhadap Impor	57
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	58
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>).....	59
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	60
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	61
BAB V	PENUTUP	63
LAMPIRAN	67
DAFTAR PUSTAKA	75

<https://jatim.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3. 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	30
Tabel 3. 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	30
Tabel 3. 3	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	31
Tabel 3. 4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	32
Tabel 3. 5	Indeks Implisit PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	32
Tabel 3. 6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	33
Tabel 3. 7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	36
Tabel 3. 8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	36
Tabel 3. 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	37
Tabel 3. 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	38
Tabel 3. 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	40
Tabel 3. 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	41
Tabel 3. 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	43
Tabel 3. 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	45
Tabel 3. 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	46
Tabel 3. 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	48
Tabel 4. 1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	53
Tabel 4. 2	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	54

Tabel 4. 3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	55
Tabel 4. 4	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	56
Tabel 4. 5	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2017-2021	56
Tabel 4. 6	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Timur, 2017-2021.....	57
Tabel 4. 7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	58
Tabel 4. 8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	59
Tabel 4. 9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Provinsi Jawa Timur, 2017-2021	61
Tabel 4. 10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) Provinsi Jawa Timur, 2017-2021.....	62

<https://jatim.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur, 2017-2021 31

<https://jatim.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	69
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	70
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	71
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	72
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	73
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021	74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

A. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

B. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

C. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
5. Perubahan Inventori
6. Ekspor Neto (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2

Kegunaan Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/regional. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/regional. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/regional.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran ADHK bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1

Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

B. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

C. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi dikelompokkan menurut COICOP (*Classification of Individual Consumption According to Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*) yaitu:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun, karena keterbatasan data maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- b. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
- c. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- d. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

D. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun.
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi) maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment* maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x
12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x
12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri.
3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu.

4. Diperoleh nilai PKRT tahun berjalan yang telah di-*adjust*.
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat).
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2

Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

A. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

B. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
- Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan,

organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

C. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji , lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
3. Penyusutan.
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

D. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menghitung PK-LNPRT Tahunan adalah

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil *updating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

2. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku. PK-LNPRT atas dasar harga konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

A. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

B. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

C. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

1. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi
2. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan
3. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi
4. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan

D. Penghitungan PKP Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Ditjen PBN)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Biro Keuangan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Ditjen PBN serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non pasar** dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

A. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

B. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

C. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

D. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan PMTB Tahunan adalah

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit kode *Harmonized System* (HS), yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga.
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (atas dasar harga berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data *output* tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut

di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkut dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode *Harmonized System 2 digit*). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio Pengeluaran output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan pengangkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

A. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah.

Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

B. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik) maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga

pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

C. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
2. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
6. Ternak untuk tujuan dipotong.
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

D. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
- b. Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Data komoditas pertambangan Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan.
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan.
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.

- g. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terpilih.
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Perum BULOG, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Ditjennak, Kementan).

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara *deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan *inflate* perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan

rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

- a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai.
- b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan.
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya.
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai.
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, untuk melengkapi estimasi industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 Ekspor Impor

A. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impur dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impur. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impur di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

B. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

C. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

1. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
2. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
3. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

D. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan ekspor impor tahunan adalah

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- d. Laporan Sistem Operasional Pelabuhan Laut (Simopel), yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN
PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017-2021

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Jawa Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kelebihan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Jawa Timur akan diekspor ke daerah lain di luar Jawa Timur, sedangkan jika permintaan domestik tinggi sementara produksi domestik tidak mencukupi maka akan mendatangkan (impor) barang dan jasa dari daerah lain di luar Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jawa Timur Menurut Pengeluaran

Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Timur berdasarkan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 3.1. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 3.2). Nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB ADHB. Sementara itu dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Nilai PDRB ADHB Jawa Timur selama kurun waktu 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB ADHB Jawa Timur mencapai 2.012.917,99 miliar rupiah. Dalam rentang lima tahun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 2.454.498,80 miliar rupiah pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, maupun ekspor impor.

Meskipun PDRB ADHB Jawa Timur mengalami kecenderungan meningkat selama periode 2017-2021, namun pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB mengalami penurunan. Hal ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah selama tahun 2020.

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 193 915,05	1 298 390,49	1 396 604,49	1 398 516,77	1 455 393,75
2. Konsumsi LNPRT	23 399,52	25 711,99	27 887,70	28 481,70	29 580,88
3. Konsumsi Pemerintah	109 444,00	120 991,07	131 003,94	129 886,86	131 936,73
4. PMTB	568 965,37	620 630,33	669 990,88	647 892,96	666 538,94
5. Perubahan Inventori	25 943,94	28 393,47	29 135,15	11 805,01	21 610,99
6. Ekspor Luar Negeri	269 410,26	296 928,80	288 492,94	317 527,24	339 134,60
7. Impor Luar Negeri	333 736,84	408 335,19	369 198,07	326 251,30	422 717,85
8. Net Ekspor Antar Daerah	155 576,69	206 055,38	171 631,53	91 931,80	233 020,76
Total PDRB	2 012 917,99	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2 454 498,80

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB ADHK Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Jawa Timur mencapai 1.482.299,58 miliar rupiah. Kemudian rentang lima tahun, nilai tersebut telah meningkat menjadi 1.669.116,89 miliar rupiah pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan semakin bertambahnya volume ekonomi Jawa Timur sebagai provinsi penopang Kawasan Indonesia Bagian Timur. Namun, sama seperti PDRB ADHB, nilai PDRB ADHK Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

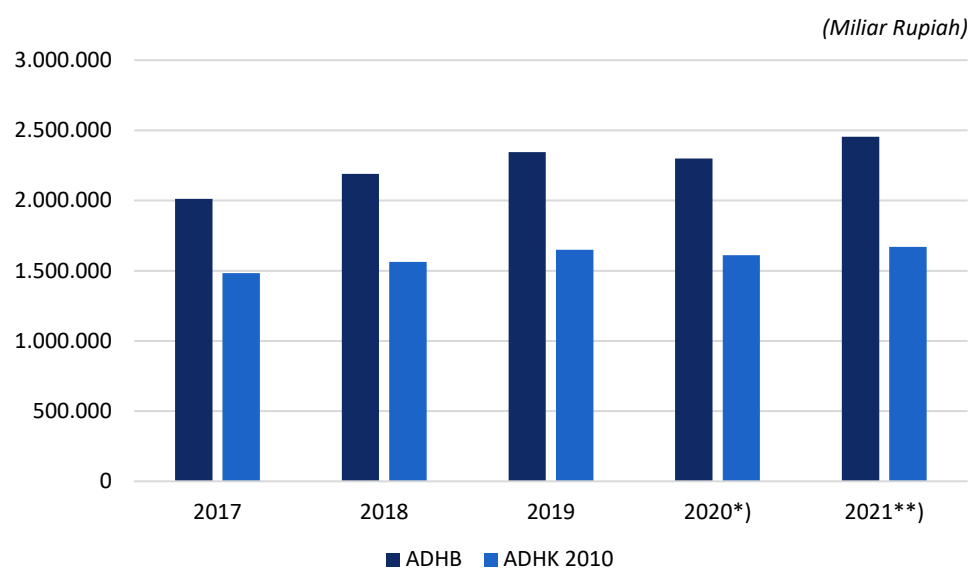
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	884 011,66	926 783,86	971 393,49	963 365,95	989 274,32
2. Konsumsi LNPRT	14 540,18	15 494,99	16 419,71	16 456,71	16 796,46
3. Konsumsi Pemerintah	67 574,95	70 757,28	73 889,18	71 538,78	71 976,43
4. PMTB	407 185,35	431 922,41	453 188,70	433 793,01	439 369,17
5. Perubahan Inventori	18 024,04	18 261,80	18 496,33	7 401,89	13 265,50
6. Ekspor Luar Negeri	198 101,30	209 977,09	209 165,11	230 446,47	234 152,60
7. Impor Luar Negeri	259 503,74	281 694,09	255 864,27	233 780,63	291 185,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	152 365,85	171 938,48	163 207,39	122 285,61	195 467,43
Total PDRB	1 482 299,58	1 563 441,82	1 649 895,64	1 611 507,78	1 669 116,89

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Gambar 1 Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur, 2017-2021



Pembentukan nilai PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Tabel 3.3 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021
(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,31	59,32	59,54	60,81	59,29
2. Konsumsi LNPRT	1,16	1,17	1,19	1,24	1,21
3. Konsumsi Pemerintah	5,44	5,53	5,59	5,65	5,38
4. PMTB	28,27	28,36	28,56	28,17	27,16
5. Perubahan Inventori	1,29	1,30	1,24	0,51	0,88
6. Ekspor Luar Negeri	13,38	13,57	12,30	13,81	13,82
7. Impor Luar Negeri	16,58	18,66	15,74	14,19	17,22
8. Net Ekspor Antar Daerah	7,73	9,41	7,32	4,00	9,49
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,51	4,84	4,81	-0,83	2,69
2. Konsumsi LNPRT	2,35	6,57	5,97	0,23	2,06
3. Konsumsi Pemerintah	3,58	4,71	4,43	-3,18	0,61
4. PMTB	5,29	6,08	4,92	-4,28	1,29
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-5,23	5,99	-0,39	10,17	1,61
7. Impor Luar Negeri	7,68	8,55	-9,17	-8,63	24,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	135,06	140,10	143,77	145,17	147,12
2. Konsumsi LNPRT	160,93	165,94	169,84	173,07	176,11
3. Konsumsi Pemerintah	161,96	170,99	177,30	181,56	183,31
4. PMTB	139,73	143,69	147,84	149,36	151,70
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	136,00	141,41	137,93	137,79	144,83
7. Impor Luar Negeri	128,61	144,96	144,29	139,55	145,17
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	135,80	140,00	142,16	142,71	147,05

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Sebelum pandemi Covid-19 menyerang pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu tumbuh di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masing-masing sebesar 5,46 persen (2017); 5,47 persen (2018); dan 5,53 persen (2019). Sementara itu, ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,33 persen dan mengalami *recovery* pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen.

Selama periode 2017-2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,53 persen dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai -2,33 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh terhambatnya kinerja ekonomi akibat wabah Covid-19 yang menerpa berbagai wilayah.

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri).

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga mengambil peranan besar dalam perekonomian Jawa Timur. Selama periode 2017-2021, komponen konsumsi rumah tangga memberikan porsi terbesar terhadap total PDRB. Lebih dari setengah perekonomian diberikan oleh konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 193 915,05	1 298 390,49	1 396 604,49	1 398 516,77	1 455 393,75
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	884 011,66	926 783,86	971 393,49	963 365,95	989 274,32
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	59,31	59,32	59,54	60,81	59,29
Rata-rata konsumsi per rumah tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	109 938,61	118 941,99	127 477,69	127 105,04	129 053,90
b. ADHK 2010	81 401,95	84 900,13	88 665,76	87 556,09	87 721,77
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	30 384,95	32 869,94	35 139,27	34 443,37	35 602,66
b. ADHK 2010	22 497,96	23 462,38	24 440,74	23 726,26	24 200,19
Pertumbuhan (persen) ²					
a. Total konsumsi RT	4,51	4,84	4,81	-0,83	2,69
b. Per rumah tangga	3,94	4,30	4,44	-1,25	0,19
c. Per kapita	3,93	4,29	4,17	-2,92	2,00
Jumlah rumah tangga (unit)	10 859 834	10 916 166	10 955 678	11 002 843	11 277 410
Jumlah penduduk (000 org)	39 293	39 501	39 745	40 603	40 879

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

¹ Indeks perkembangan

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Berdasarkan Tabel 3.6, jika dibandingkan kondisi lima tahun yang lalu, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selama periode tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan porsi mencapai 60,81 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 59,29 persen.

Konsumsi rumah tangga ADHK selama periode 2017 hingga 2021 mengalami akselerasi, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat serangan wabah Covid-19. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,84 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,83 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,29 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -2,92 persen. Dalam kondisi normal, nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini. Sementara itu, dalam kondisi pandemi, konsumsi rumah tangga terdampak signifikan sehingga mengalami penurunan. Hal ini turut berdampak pada penurunan konsumsi per kapita pada tahun 2020.

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 berdampak pada terkontraksinya konsumsi rumah tangga pada tahun tersebut. Selama pandemi terjadi, masyarakat cenderung untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menunda konsumsi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Pengurangan konsumsi ini juga didorong oleh adanya indikasi penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat terhambatnya kinerja ekonomi serta ruang gerak masyarakat selama pandemi.

Rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk dan selalu diikuti pula oleh perubahan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita selama tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa, pada periode sebelum ada Pandemi Covid-19, rata-rata konsumsi setiap penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” dalam periode 2017 hingga 2019 secara berturut-turut adalah 3,93 persen (2018), 4,29 persen

(2018), dan 4,17 persen (2019). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Namun, semenjak wabah virus Covid-19 melanda Jawa Timur, mulai pada akhir kuartal pertama tahun 2020, rata-rata konsumsi per kapita tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,92 persen. Kemudian rata-rata konsumsi perkapita kembali tumbuh positif pada tahun 2021 sebesar 2,00 persen.

Sementara itu, rata-rata konsumsi per rumah tangga meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali tumbuh positif pada tahun 2021. Pada tahun 2017, secara umum setiap rumah tangga di Jawa Timur menghabiskan dana sekitar 109.938,61 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 118.941,99 ribu rupiah (2018); dan 127.477,69 ribu rupiah (2019). Rata-rata konsumsi per rumah tangga mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 127.105,04 ribu rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 129.053,90 ribu rupiah.

Apabila ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran -1 sampai 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 4,44 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,25 persen. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga pada tahun 2020 berkontraksi. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi per rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2021, hal ini terlihat dari pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga yang tumbuh positif sejalan dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian.

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat ditunjukkan bahwa struktur konsumsi rumah tangga Jawa Timur berdasarkan kelompok konsumsi didominasi oleh konsumsi bukan makanan. Selama periode 2017 hingga 2021, porsi konsumsi bukan makanan selalu lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Porsi konsumsi non makanan berada pada kisaran 66 hingga 69 persen, dan sisanya adalah konsumsi makanan (31-34 persen). Secara lebih detail, proporsi konsumsi makanan untuk setiap tahunnya adalah 31,93 persen (2017); 31,67 persen (2018); 31,46 persen (2019); 33,08 persen (2020), dan 33,87 persen (2021).

Sementara itu, proporsi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga Jawa Timur sebagian besar berada pada kelompok konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Porsi konsumsi pada kelompok ini berada pada kisaran 20 hingga 25 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 3.7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021³

<i>(Persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,93	31,67	31,46	33,08	33,87
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,81	3,82	3,75	3,75	3,77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,87	10,71	10,54	11,07	11,20
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,45	7,41	7,34	7,92	7,79
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24,26	24,60	25,00	21,37	20,26
f. Hotel dan Restoran	16,66	16,78	16,91	17,36	17,45
g. Lainnya	5,02	5,02	4,99	5,44	5,66
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pola proporsi konsumsi tersebut, menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting akibat adanya perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

<i>(Persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,15	4,40	4,13	3,86	4,45
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,36	3,63	3,94	-1,11	2,40
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,65	3,94	3,72	3,24	3,17
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,68	4,16	3,96	6,16	0,47
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,18	6,52	6,30	-11,90	0,48
f. Hotel dan Restoran	4,41	4,46	5,35	0,63	2,21
g. Lainnya	4,43	3,99	3,99	6,47	5,19

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Pertumbuhan “riil” menunjukkan perubahan konsumsi akhir rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Apabila dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok konsumsi makanan cenderung stabil pada kisaran 3 hingga 4 persen, selama tahun 2017 hingga 2021 pertumbuhan kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok secara berturut-turut adalah 3,15 persen; 4,40 persen; 4,13 persen; 3,86 persen, dan 4,45 persen. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak kecil pada pengeluaran rumah tangga pada kelompok konsumsi makanan. Pertumbuhan riil kelompok konsumsi makanan hanya tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya dari 4,13 persen menjadi 3,86 persen. Hal ini disebabkan karena konsumsi makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup masyarakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi jenis konsumsi lainnya.

Di sisi lain, pertumbuhan “riil” untuk kelompok konsumsi non makanan cenderung lebih fluktuatif. Wabah virus Covid-19 berdampak signifikan pada konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok konsumsi non makanan. Pada tahun 2020, kelompok konsumsi pakaian dan alas kaki serta transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya terjadi pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -1,11 persen dan -11,90 persen. Sementara itu, pada kelompok konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah serta hotel dan restoran terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Merebaknya Covid-19 mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kesehatan serta terjadi perubahan pola kebiasaan hidup sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus. Perubahan ini turut mendorong pertumbuhan konsumsi pada kelompok kesehatan dan pendidikan serta kelompok konsumsi lainnya.

Tabel 3.9 Perubahan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur, 2017-2021⁴

<i>(Persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,99	3,33	2,60	1,40	1,99
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,21	5,03	1,77	1,02	2,33
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,67	3,08	2,14	1,85	2,08
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	3,88	2,57	1,68	1,91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,63	3,52	2,82	-2,81	-1,81
f. Hotel dan Restoran	3,32	4,83	2,90	2,17	2,30
g. Lainnya	3,14	4,56	2,92	2,53	2,78

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tabel 3.9 menunjukkan tingkat perubahan harga secara implisit. Tabel tersebut menunjukkan bahwa selalu terjadi perubahan harga setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Selama periode 2017 hingga 2021 peningkatan harga (inflasi) cenderung melambat, baik pada kelompok konsumsi makanan maupun non makanan. Pada kelompok konsumsi makanan, peningkatan harga yang terjadi sebesar 2,99 persen (2017); 3,33 persen (2018); 2,60 persen (2019); 1,40 persen (2020), dan 1,99 persen (2021). Sementara itu, pada kelompok konsumsi non makanan (mencakup kelompok konsumsi b sampai dengan g pada Tabel 3.9), rata-rata peningkatan harga yang terjadi setiap tahunnya adalah 3,03 persen (2017); 3,92 persen (2018) 2,64 persen (2019) 0,73 persen (2020) dan 0,99 persen (2021). Pada kelompok ini, hanya konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang mengalami penurunan harga (deflasi) pada tahun 2020 dan 2021 yakni masing-masing sebesar -2,81 persen, dan -1,81 persen.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangatlah kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan peranan LNPRT dalam perekonomian yang dilihat dari proporsinya terhadap total PDRB.

Tabel 3. 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	23 399,52	25 711,99	27 887,70	28 481,70	29 580,88
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	14 540,18	15 494,99	16 419,71	16 456,71	16 796,46
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,16	1,17	1,19	1,24	1,21

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selama periode tahun 2017-2021 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku mencapai 23.399,52 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 25.711,99 miliar rupiah (2018); 27.887,70 miliar rupiah (2019); 28.481,70 miliar rupiah (2020), dan 29 580,88 miliar rupiah (2021). Demikian pula dengan konsumsi LNPRT yang dinilai atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami

peningkatan. Konsumsi LNPRT ADHK pada tahun 2017 mencapai 14.540,18 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 15.494,99 miliar rupiah (2018); 16.419,71 miliar rupiah (2019); 16.456,71 miliar rupiah (2020), dan terus meningkat hingga mencapai 16.796,46 miliar rupiah pada tahun 2021.

Proporsi konsumsi LNPRT dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif kecil, dengan kontribusi di bawah dua persen. Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2019 relatif stabil dengan kisaran 1,16 sampai 1,19 persen. Selanjutnya, kontribusi LNPRT terhadap PDRB tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, dari 1,19 persen (2019) menjadi 1,24 persen (2020), dan 1,21 persen (2021). Peningkatan ini didorong oleh kegiatan partai politik selama rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yang diadakan pada 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, kegiatan berbagai lembaga kemanusiaan selama masa pandemi Covid-19 juga turut berpengaruh pada tingkat konsumsi LNPRT pada tahun tersebut.

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Dalam perekonomian suatu wilayah, pemerintah memegang peranan yang penting. Untuk menjalankan roda perekonomian, unit pemerintah dapat berperan dalam aktivitas konsumsi barang dan jasa, aktivitas produksi barang dan jasa serta investasi, dan juga berperan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan baik di bidang fiskal maupun moneter.

Dalam rentang lima tahun terakhir, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 109.444,00 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 131.936,73 miliar rupiah tahun 2021. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu tersebut dari 67.574,95 miliar rupiah (2017) menjadi 71.976,43 miliar rupiah (2021). Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Jawa Timur relatif stabil sepanjang tahun 2017 hingga 2021 dengan peranan sebesar 5 persen per tahun. Sepanjang periode ini, peran pemerintah cenderung stabil dari 5,44 persen pada tahun 2017 menjadi 5,38 persen pada tahun 2021.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun

tidak langsung. Peningkatan konsumsi pemerintah seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 2.785,33 ribu rupiah dan naik menjadi 3.227,51 ribu rupiah pada tahun 2021.

Tabel 3. 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	109 444,00	120 991,07	131 003,94	129 886,86	131 936,73
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	67 574,95	70 757,28	73 889,18	71 538,78	71 976,43
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	5,44	5,53	5,59	5,65	5,38
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2 785,33	3 063,00	3 296,12	3 198,92	3 227,51
b. ADHK 2010	1 719,77	1 791,28	1 859,09	1 761,89	1 760,73
Pertumbuhan (persen) ⁵					
a. Konsumsi pemerintah	3,58	4,71	4,43	-3,18	0,61
b. Konsumsi Per Kapita	3,01	4,16	3,79	-5,23	-0,07
Jumlah penduduk (000 org)	39 293	39 501	39 745	40 603	40 879

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan lima tahun lalu, namun konsumsi pemerintah tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 turun -3,18 persen. Sementara itu nilai konsumsi pemerintah per kapita pada tahun yang sama turun -5,23 persen. Kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita masih berlanjut pada tahun 2021 yakni sebesar 0,07 persen, sedangkan konsumsi pemerintah secara total tumbuh cukup lambat dengan angka pertumbuhan sebesar 0,61 persen. Kontraksi konsumsi pemerintah pada tahun 2020 yang berlanjut sampai tahun 2021 disebabkan oleh terhambatnya realisasi anggaran pemerintah akibat pembatasan ruang gerak selama masa Pandemi Covid-19 serta adanya kebijakan realokasi anggaran pemerintah dalam rangka penanganan wabah.

Konsumsi pemerintah terbagi atas dua jenis konsumsi yakni konsumsi kolektif dan individu. Pada tahun 2017-2020, proporsi konsumsi kolektif selalu lebih besar dibandingkan konsumsi individu, sedangkan pada tahun 2021 konsumsi kolektif lebih kecil dari proporsi konsumsi individu.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Porsi konsumsi kolektif terhadap total konsumsi pemerintah berkisar antara 49 hingga 53 persen setiap tahunnya. Secara nominal, konsumsi kolektif hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada rentang 2020 hingga 2021 mengalami penurunan sebagai akibat dari penerapan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 (lihat tabel 3.12). Selain itu, kontribusi konsumsi kolektif terhadap total konsumsi akhir pemerintah berfluktuatif. Pada tahun 2017 kontribusinya mencapai 53,70 persen, selanjutnya proporsi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 dan meningkat kembali pada tahun 2019 yakni menjadi sebesar 52,49 persen (2018) dan 52,67 persen (2019). Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 porsi konsumsi kolektif kembali mengalami penurunan yang cukup dalam menjadi 50,02 persen dan 49,69 persen karena adanya kebijakan realokasi anggaran sebagai upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 serta program pemulihan ekonomi.

Tabel 3. 12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir Pemerintah ⁶					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	58 776,36	63 503,60	69 005,96	64 973,08	65 553,32
(%)	53,70	52,49	52,67	50,02	49,69
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	50 667,64	57 487,46	61 997,98	64 913,78	66 383,41
(%)	46,30	47,51	47,33	49,98	50,31
Total Konsumsi (Miliar Rp)	109 444,00	120 991,07	131 003,94	129 886,86	131 936,73
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	5,04	5,35	5,31	-7,49	-0,13
b. Konsumsi Individu	1,84	3,93	3,33	2,28	1,46
Total Konsumsi	3,58	4,71	4,43	-3,18	0,61
Pertumbuhan indeks harga implisit ⁷ (%)					
a. Konsumsi Kolektif	9,02	2,56	3,19	1,78	1,02
b. Konsumsi Individu	1,09	9,17	4,37	2,37	0,80
Total Konsumsi	5,10	5,58	3,69	2,40	0,96

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

⁷ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Pertumbuhan riil konsumsi kolektif selama tahun 2017 hingga 2021 relatif stabil pada kisaran 5 persen, kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontraksi konsumsi kolektif tahun 2020 disebabkan oleh kebijakan realokasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan wabah.

Selama periode tahun 2017-2021, konsumsi individu secara nominal terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 3.12). Sedangkan secara proporsi, konsumsi individu berada pada kisaran angka 46-50 persen. Pada tahun 2017 proporsi konsumsi individu mencapai 46,30 persen, kemudian naik menjadi 47,51 persen pada tahun 2018 dan menurun tipis pada tahun 2019 menjadi sebesar 47,33 persen. Kemudian pada periode 2020 dan 2021, porsi konsumsi individu meningkat cukup signifikan pada kisaran 49-50 persen. Kenaikan porsi ini didorong oleh realisasi belanja sosial dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dari sisi pertumbuhan riil, realisasi ini juga mendorong konsumsi individu tahun 2020 dan tahun 2021 untuk tumbuh positif hingga mencapai 2,28 dan 1,46 persen.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik⁸. Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Dalam kurun waktu lima tahun, nilai PMTB Jawa Timur mengalami peningkatan yang pesat. Jika dinilai ADHB, PMTB Jawa Timur naik dari 568.965,37 miliar rupiah (2017) menjadi 666.538,94 miliar rupiah (2021) dan jika dinilai ADHK 2010, PMTB naik dari 407.185,35 miliar rupiah (2017) menjadi 439.369,17 miliar (2021).

Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Jawa Timur cukup besar. Sumbangan komponen ini berkisar antara 27-28 persen dari total PDRB. Dari sisi pertumbuhan riil, sebelum adanya pandemi Covid-19, PMTB selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 6,08 persen. Namun, pada tahun 2020 kinerja PMTB terhambat oleh merebaknya virus Covid-19 di seluruh wilayah. Hal ini menyebabkan komponen PMTB tumbuh negatif sebesar -4,28 persen.

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir ataupun ekspor

Tabel 3. 13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	568 965,37	620 630,33	669 990,88	647 892,96	666 538,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	407 185,35	431 922,41	453 188,70	433 793,01	439 369,17
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	28,27	28,36	28,56	28,17	27,16
Struktur PMTB ⁹					
a. Bangunan (Miliar Rp)	453 713,97	495 958,98	537 710,50	518 027,50	533 249,40
(%)	79,74	79,91	80,26	79,96	80,00
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	115 251,40	124 671,35	132 280,38	129 865,45	133 289,54
(%)	20,26	20,09	19,74	20,04	20,00
Total PMTB (Miliar Rp)	568 965,37	620 630,33	669 990,88	647 892,96	666 538,94
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁰ (%)					
a. Bangunan	5,30	6,13	5,27	-4,35	1,52
b. Non Bangunan	5,27	5,87	3,68	-4,01	0,46
Total PMTB	5,29	6,08	4,92	-4,28	1,29

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Ditinjau menurut jenisnya, PMTB dibedakan menjadi 2 jenis aset, yakni bangunan dan non bangunan. Struktur PMTB Jawa Timur sepanjang tahun 2017 hingga 2021 didominasi oleh PMTB bangunan. Proporsi PMTB bangunan terhadap total PMTB berkisar antara 79-80 persen setiap tahunnya. Kinerja PMTB bangunan tahun 2017 hingga 2019 cukup baik dengan pertumbuhan riil selalu di atas 5 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 6,13 persen. Pandemi Covid-19 yang melanda Jawa Timur mulai tahun 2020 turut menghambat proses pembangunan beberapa proyek infrastruktur, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Terhambatnya proses konstruksi ini berdampak pada terbatasnya penciptaan asset fisik pada tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan riil PMTB bangunan mengalami kontraksi mencapai 4,35 persen. Sementara itu, kinerja PMTB Bangunan mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 yang ditunjukkan dengan mulai meningkatnya pertumbuhan PMTB Bangunan sebesar 1,52 persen pada tahun tersebut. Hal ini seiring dengan mulai membaiknya perekonomian walaupun pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Dalam lima tahun terakhir, PMTB non bangunan memberikan kontribusi sekitar 19-20 persen terhadap ekonomi Jawa Timur setiap tahunnya. Dalam periode tersebut, pertumbuhan riil PMTB non bangunan setiap tahunnya hampir selalu lebih lambat dibandingkan PMTB bangunan. Pada tahun 2017 hingga 2019, pertumbuhan PMTB non bangunan mampu tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2018 sebesar 5,87 persen. Kemudian pada tahun 2020, PMTB non bangunan mengalami kontraksi sebesar -4,01 persen. Selama tahun 2020, banyak wilayah membatasi interaksi dengan wilayah luar untuk mencegah penularan virus semakin *massif*. Terbatasnya interaksi ini turut menghambat pemenuhan barang-barang modal dalam wilayah Jawa Timur, terutama barang modal yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, kondisi PMTB non-bangunan tahun 2021 tumbuh sebesar 0,46 persen, tidak setinggi sebelum pandemi. Namun demikian, upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan kembali roda perekonomian di tengah pandemi cukup membuahkan hasil dan perlu mendapatkan apresiasi.

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Barang persediaan bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, maupun bahan penolong.

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi perubahan inventori dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 3. 14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	25 943,94	28 393,47	29 135,15	11 805,01	21 610,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	18 024,04	18 261,80	18 496,33	7 401,89	13 265,50
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	1,29	1,30	1,24	0,51	0,88

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Nilai perubahan inventori Jawa Timur tahun 2017 sebesar 25.943,94 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga berlaku dan 18.024,04 miliar rupiah jika dinilai atas dasar harga konstan 2010. Nilai perubahan inventori cenderung stabil hingga tahun 2019 dengan kontribusi terhadap total PDRB sekitar 1,2 hingga 1,3 persen setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 dan 2021 kontribusi perubahan inventori mengalami penurunan dari 1,24 persen (2019) menjadi 0,51 persen (2020) dan 0,88 persen (2021). Penurunan ini didorong oleh melemahnya kegiatan ekonomi Jawa Timur selama masa pandemi Covid-19. Terhambatnya pasokan barang, baik dari luar negeri dan luar provinsi berdampak pada penurunan nilai perubahan inventori. Selain itu, pemenuhan barang untuk konsumsi domestik dalam dan luar provinsi juga turut berpengaruh terhadap kondisi perubahan inventori Jawa Timur sepanjang tahun 2020.

3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor luar negeri menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Ekspor luar negeri Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Ekspor luar negeri atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar 269.410,26 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 339.134,60 miliar rupiah pada 2021. Apabila dinilai atas dasar harga konstan 2010, nilai ekspor luar negeri Jawa Timur juga meningkat dalam rentang waktu tersebut, dari 198.101,30 miliar rupiah (2017) menjadi 234.152,60 miliar rupiah (2021).

Tabel 3. 15 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	269 410,26	296 928,80	288 492,94	317 527,24	339 134,60
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	198 101,30	209 977,09	209 165,11	230 446,47	234 152,60
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	13,38	13,57	12,30	13,81	13,82
Struktur Ekspor ¹¹					
a. Barang (Miliar Rp)	255 627,51	281 236,21	273 490,09	308 638,91	332 520,20
(%)	94,88	94,72	94,80	97,20	98,05
b. Jasa (Miliar Rp)	13 782,75	15 692,60	15 002,84	8 888,33	6 614,40
(%)	5,12	5,28	5,20	2,80	1,95
Total Ekspor (Miliar Rp)	269 410,26	296 928,80	288 492,94	317 527,24	339 134,60
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹² (%)					
a. Barang	-5,83	5,79	-0,09	12,30	2,27
b. Jasa	10,30	10,52	-6,53	-37,02	-24,58
Total Ekspor	-5,23	5,99	-0,39	10,17	1,61

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Ekspor luar negeri mengambil peran yang cukup besar dalam perekonomian Jawa Timur. Kontribusi ekspor luar negeri terhadap total PDRB berkisar antara 12-13 persen setiap tahunnya. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,82 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 12,30 persen. Namun pertumbuhan riil ekspor luar negeri Jawa Timur cenderung berfluktuatif. Dalam periode tahun 2017 hingga 2021, pertumbuhan riil ekspor luar negeri tercatat mengalami kontraksi sebanyak dua kali yakni pada tahun 2017 (-5,23 persen) dan 2019 (-0,39 persen). Sementara pada periode lainnya ekspor luar negeri mampu tumbuh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor luar negeri sangat tergantung pada permintaan global serta kondisi perekonomian negara tujuan ekspor. Kinerja ekspor luar negeri selama masa pandemi tercatat sangat baik. Di tengah kondisi yang sulit, ekspor luar negeri menjadi salah satu komponen pengeluaran yang tumbuh positif sebesar 10,17 persen (2020) dan 1,61 persen (2021).

Komposisi ekspor luar negeri Jawa Timur didominasi oleh ekspor barang. Selama periode 2017 hingga 2021, sekitar 94-98 persen ekspor ke luar negeri berbentuk barang sedangkan sisanya berupa jasa. Pandemi Covid-19 turut berdampak pada komposisi ekspor luar negeri Jawa Timur.

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Porsi ekspor barang luar negeri sebelum pandemi berkisar antara 94 persen, namun porsi ini meningkat hingga 97,20 persen pada tahun 2020 dan 98,05 persen pada tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas unggulan Jawa Timur. Di sisi lain, ekspor jasa luar negeri selama tahun pertama pandemi mengalami penurunan dari sekitar 5 persen (2017 hingga 2019) menjadi 2,80 persen (2020) dan turun menjadi 1,95 persen (2021). Penurunan porsi ekspor jasa ke luar negeri pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pembatasan mobilitas penduduk untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pertumbuhan riil ekspor barang dari Jawa Timur ke luar negeri selama tahun 2017 hingga 2021 cukup bergejolak. Pertumbuhan terendah tercatat pada tahun 2017 sebesar -5,83 persen dan pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 12,30 persen. Capaian ekspor barang luar negeri tahun 2020 didorong oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas unggulan Jawa Timur ke luar negeri seperti perhiasan, kayu/barang dari kayu, tembaga dan perabot. Tak berbeda jauh dengan kondisi ekspor barang, pertumbuhan riil ekspor jasa juga relatif berfluktuatif. Pertumbuhan riil ekspor jasa tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing mencapai 10,30 persen dan 10,52 persen. Namun mulai tahun 2019, ekspor jasa mengalami kontraksi hingga mencapai titik terdalam pada tahun 2020 sebesar -37,02 persen. Salah satu penyebab kontraksi ekspor jasa ke luar negeri tahun 2020 adalah penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jawa Timur yang signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh merebaknya virus Covid-19 mulai awal tahun 2020. Untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, sejumlah negara menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk antar negara, termasuk untuk tujuan wisata. Keadaan kunjungan wisman pada tahun 2021 juga masih belum menunjukkan perbaikan, sehingga berdampak pada belum membaiknya ekspor jasa pada tahun 2021. Tercatat ekspor jasa tahun 2021 kembali mengalami kontraksi sebesar 24,58 persen.

3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Di dalam aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jawa Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan adanya tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang dan jasa, namun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Tabel 3. 16 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	333 736,84	408 335,19	369 198,07	326 251,30	422 717,85
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	259 503,74	281 694,09	255 864,27	233 780,63	291 185,03
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	16,58	18,66	15,74	14,19	17,22
Struktur Impor ¹³					
a. Barang (Miliar Rp)	305 603,00	374 370,42	334 669,35	297 662,65	395 959,42
(%)	91,57	91,68	90,65	91,24	93,67
b. Jasa (Miliar Rp)	28 133,84	33 964,77	34 528,71	28 588,65	26 758,43
(%)	8,43	8,32	9,35	8,76	6,33
Total Impor (Miliar Rp)	333 736,84	408 335,19	369 198,07	326 251,30	422 717,85
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹⁴ (%)					
a. Barang	8,18	8,39	-9,47	-8,20	26,91
b. Jasa	1,62	10,63	-5,39	-13,75	-5,46
Total Impor	7,68	8,55	-9,17	-8,63	24,55

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Perkembangan pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa Timur terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Jawa Timur di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun non makanan (termasuk jasa).

Perkembangan impor luar negeri Jawa Timur selama periode tahun 2017-2021 cukup berfluktuatif, baik untuk impor luar negeri yang dinilai ADHB maupun ADHK 2010. Nilai impor luar negeri atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 333.736,84 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2018 impor luar negeri mengalami peningkatan yakni mencapai 408.335,19 miliar rupiah. Tahun 2019 dan 2020 impor luar negeri Jawa Timur tercatat mengalami penurunan dengan nilai impor secara berurutan sebesar 369.198,07 miliar rupiah dan 326.251,30 miliar rupiah. Impor kembali menguat pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 422.717,85 miliar rupiah.

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Proporsi impor luar negeri terhadap total PDRB selama periode 2017-2021 juga bervariasi dengan rentang antara 14 persen sampai 17 persen. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 18,66 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 14,19 persen. Pertumbuhan riil impor luar negeri Jawa Timur mengalami akselerasi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 7,68 persen dan 8,55 persen. Selanjutnya, pertumbuhan impor luar negeri mengalami kontraksi pada tahun 2019 dan tahun 2020 yakni sebesar 9,17 persen dan 8,63 persen. Impor luar Jawa Timur kembali menguat pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 24,55 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar impor Jawa Timur dari luar negeri berupa barang dan hanya sebagian kecil saja yang berbentuk jasa. Selama periode tahun 2017 hingga 2021, komposisi impor luar negeri relatif sama. Impor barang dari luar negeri berkisar antara 90-93 persen dari total impor luar negeri dan sisanya adalah impor jasa.

Secara riil, pertumbuhan impor barang Jawa Timur dari luar negeri relatif berfluktuatif. Impor barang luar negeri mengalami akselerasi pada tahun 2017 (8,18 persen) dan tahun 2018 (8,39 persen). Selanjutnya impor barang dari luar negeri berkontraksi sebesar -9,47 persen pada tahun 2019 dan kembali berkontraksi pada berikutnya sebesar -8,20 persen. Kontraksi impor barang dari luar negeri pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan impor beberapa komoditas seperti besi dan baja, pupuk, mesin-mesin, serta bahan kimia organik. Impor barang kembali menguat pada tahun 2021 sebesar 26,91 persen. Sementara itu, pertumbuhan impor jasa Jawa Timur dari luar negeri juga cukup berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 10,63 persen. Dalam rentang waktu lima tahun, kontraksi tercatat sebanyak tiga kali yakni pada tahun 2019 (-5,39 persen), tahun 2020 (-13,75 persen), dan tahun 2021 (-5,46 persen).

3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, dan sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor-impor dengan metode *cross hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output bayangan. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

<https://jatim.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB PROVINSI JAWA TIMUR
MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017-2021

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	2 012 917,99	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2 454 498,80
b. ADHK 2010	1 482 299,58	1 563 441,82	1 649 895,64	1 611 507,78	1 669 116,89
PDRB Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	51 228,45	55 410,61	59 015,17	56 640,41	60 043,33
b. ADHK 2010	37 724,29	39 579,95	41 512,20	39 689,02	40 830,88
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010 (%)	4,87	4,92	4,88	-4,39	2,88
Jumlah penduduk (000 org)	39 293	39 501	39 745	40 603	40 879
Pertumbuhan	0,56	0,53	0,62	2,16	0,68

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Jawa Timur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) senilai per kapita pada masing-masing tahunnya.

Pada tahun 2017-2019, pertumbuhan per kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 4 - 5 persen. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat sekitar 0,5 - 0,6 persen setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga secara kualitas. Selanjutnya pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, perekonomian telah membaik meskipun belum mencapai kondisi tahun 2017-2019.

4.2

Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini kontribusi konsumsi rumah tangga sangat dominan dalam PDRB Jawa Timur (sekitar 60 persen), yang berarti seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Jawa Timur sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Meskipun didalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1 193 915,05	1 298 390,49	1 396 604,49	1 398 516,77	1 455 393,75
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	950 704,07	1 119 365,74	1 144 969,70	1 112 036,61	1 268 386,63
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,26	1,16	1,22	1,26	1,15

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2017, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 1,26 kali dari produk yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2017 hingga 2018, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor cenderung menurun. Secara implisit hal ini menjelaskan bahwa laju peningkatan ekspor jauh lebih cepat dibandingkan konsumsi rumah tangga. Laju peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan volume dan juga harga. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020, laju peningkatan ekspor lebih lambat dibandingkan konsumsi rumah tangga sehingga rasio mengalami kenaikan menjadi 1,22 (2019) dan 1,26 (2020). Kondisi ini mulai berubah kembali pada tahun 2021, nilai rasio kembali turun menjadi 1,15 akibat kenaikan ekspor yang signifikan.

4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Jawa Timur digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1 193 915,05	1 298 390,49	1 396 604,49	1 398 516,77	1 455 393,75
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	568 965,37	620 630,33	669 990,88	647 892,96	666 538,94
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,10	2,09	2,08	2,16	2,18

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun dalam rentang tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 2,10 menurun menjadi 2,09 pada tahun 2018, dan 2,08 pada tahun 2019. Hal dikarenakan pada periode tersebut pertumbuhan penciptaan investasi fisik tumbuh lebih cepat dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga. Kemudian mulai tahun 2020, rasio mengalami kenaikan menjadi 2,16 pada tahun 2020 dan 2,18 pada tahun 2021. Peningkatan rasio ini dikarenakan pertumbuhan investasi fisik lebih rendah jika dibandingkan konsumsi rumah tangga. Kondisi tersebut muncul sebagai dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja komponen konsumsi rumah tangga dan investasi fisik.

4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (PDRB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	1 193 915,05	1 298 390,49	1 396 604,49	1 398 516,77	1 455 393,75
b. LNPRT	23 399,52	25 711,99	27 887,70	28 481,70	29 580,88
c. Pemerintah	109 444,00	120 991,07	131 003,94	129 886,86	131 936,73
Jumlah	1 326 758,57	1 445 093,55	1 555 496,12	1 556 885,34	1 616 911,36
PDRB (ADHB (Miliar Rp)	2 012 917,99	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2 454 498,80
Proporsi (%)	65,91	66,02	66,32	67,70	65,88

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 65 persen). Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan sebagai konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil. Dari tiga pelaku konsumsi akhir, konsumsi terbesar dilakukan oleh rumah tangga diikuti pemerintah dan LNPRT

4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik dan diperdagangkan keluar baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain akan menjadi produk ekspor. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Di sisi lain, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital.

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	950 704,07	1 119 365,74	1 144 969,70	1 112 036,61	1 268 386,63
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	568 965,37	620 630,33	669 990,88	647 892,96	666 538,94
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,67	1,80	1,71	1,72	1,90

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Selama tahun 2017-2021, nilai ekspor lebih tinggi jika dibandingkan dengan PMTB. Rasio ekspor terhadap PMTB meningkat dari tahun 2017 hingga 2018, kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 namun kembali naik hingga tahun 2021. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio selama periode 2017-2018 disebabkan oleh laju pertumbuhan nilai ekspor lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB. Penurunan rasio pada tahun 2019 disebabkan laju pertumbuhan nilai ekspor lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB. Pada tahun 2020, kedua komponen ini mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, namun kontraksi pertumbuhan PMTB jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekspor. Selanjutnya pada tahun 2021, pertumbuhan nilai ekspor melaju jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB.

4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Melalui rasio ini, dapat digambarkan ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Apabila nilai rasio kecil, maka dapat diartikan ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4. 6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2 012 917,99	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2 454 498,80
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	859 453,97	1 024 716,75	1 054 043,30	1 028 828,87	1 118 949,12
Rasio PDRB terhadap Impor	2,34	2,14	2,23	2,24	2,19

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2017 hingga 2018, rasio total PDRB terhadap impor mengalami penurunan dari 2,34 (2017) menjadi 2,14 (2018). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan PDRB terhadap produk impor dalam rentang periode tersebut. Kemudian mulai tahun 2019 hingga 2020, nilai rasio meningkat menjadi 2,23 (2019) dan 2,24 (2020), yang artinya terdapat kecenderungan penurunan ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Namun, nilai rasio kembali turun pada tahun 2021 (2,19) yang dapat diartikan ketergantungan terhadap impor kembali meningkat.

4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB)					
(Miliar Rp)	2 012 917,99	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2 454 498,80
(%)	70,08	68,11	69,00	69,09	68,69
Total Nilai Impor ADHB					
(Miliar Rp)	859 453,97	1 024 716,75	1 054 043,30	1 028 828,87	1 118 949,12
(%)	29,92	31,89	31,00	30,91	31,31
<u>Total Permintaan Akhir</u>					
(Miliar Rp)	2 872 371,96	3 213 483,09	3 399 591,85	3 328 619,92	3 573 447,92
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah. Persentase jumlah produk yang diimpor sekitar 29-32 persen dari total permintaan akhir. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh produksi domestik sekitar 70 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tendensi permintaan (akhir) masyarakat mengalami peningkatan, dari 2.872.371,96 miliar rupiah (2017) menjadi sebesar 3.573.447,92 miliar rupiah (2021).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 2.012.917,99 miliar rupiah (2017) menjadi 2.454.498,80 miliar rupiah (2021). Meskipun demikian, produk domestik yang dihasilkan tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan akhir, sehingga dilakukan impor barang dan jasa dari luar wilayah Jawa Timur. Total nilai impor juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 859.453,97 miliar rupiah (2017) menjadi 1.118.949,12 miliar rupiah (2021).

Apabila dibandingkan tahun 2020, total permintaan akhir Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan ini didorong oleh adanya pemulihan ekonomi yang telah terdampak pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Selain berdampak pada sisi permintaan, pemulihan ekonomi juga berdampak pada peningkatan total penyediaan.

4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan jika terjadi sebaliknya maka terjadi defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	950.704,07	1.119.365,74	1.144.969,70	1.112.036,61	1.268.386,63
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	859.453,97	1.024.716,75	1.054.043,30	1.028.828,87	1.118.949,12
Net Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	91.250,11	94.648,99	90.926,40	83.207,75	149.437,51
Rasio Ekspor terhadap Impor	1,11	1,09	1,09	1,08	1,13

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selama periode 2017-2021, posisi perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Timur selalu bernilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Timur dalam posisi surplus. Surplus perdagangan ini didorong oleh posisi net ekspor antar daerah yang selalu positif (surplus). Sementara itu untuk nilai net ekspor luar negeri cenderung selalu negatif (defisit), namun nilai defisit net ekspor luar negeri lebih kecil jika dibandingkan nilai surplus net ekspor antar daerah, sehingga secara agregat mampu menciptakan surplus neraca perdagangan.

Surplus perdagangan antar daerah Jawa Timur didorong oleh tingginya volume ekspor Jawa Timur ke provinsi lain, terutama ke Kawasan Indonesia Timur. Hingga kini, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah penunjang kebutuhan masyarakat Indonesia bagian timur baik berupa barang-barang industri maupun produk pertanian. Surplus perdagangan yang tercatat adalah 91.250,11 miliar rupiah (2017); 94.648,99 miliar rupiah (2018); 90.926,40 miliar rupiah (2019); 83.207,75 miliar rupiah (2020); dan 149.437,51 miliar rupiah (2021).

Rasio ekspor terhadap impor Jawa Timur selama periode 2017 hingga 2021 relatif stabil dan selalu di atas satu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor Jawa Timur selalu lebih besar dibanding nilai impor setiap tahunnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 turut berdampak terhadap kondisi ekspor impor Jawa Timur. Dampak terlihat dari nilai rasio ekspor terhadap impor tahun 2020 yang lebih kecil dibandingkan rasio tahun-tahun sebelumnya. Namun nilai rasio kembali meningkat pada tahun 2021 seiring dengan adanya pemulihan ekonomi.

4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri. Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor luar negeri dikurangi impor luar negeri dibagi dengan jumlah ekspor dan impor luar negeri. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d $+1$ ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara -1 dan 0 , maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara 0 dan $+1$, maka perdagangan internasional didominasi oleh ekspor.

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Jawa Timur selama tahun 2017-2021 berkisar antara -1 dan 0 , artinya aktivitas perdagangan internasional didominasi oleh impor. Jika dilihat nilai RPI dari tahun ke tahun, RPI Jawa Timur tahun 2020 mendekati angka nol, yang berarti defisit neraca perdagangan internasional relatif kecil. Kondisi ini didorong oleh kinerja ekspor luar negeri Jawa Timur tumbuh positif di tengah Pandemi Covid-19, sementara impor berkontraksi. Pada tahun 2021, RPI kembali ke level sebelum pandemi dikarenakan adanya pemulihan kondisi ekonomi.

Tabel 4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI) Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	269 410,26	296 928,80	288 492,94	317 527,24	339 134,60
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	333 736,84	408 335,19	369 198,07	326 251,30	422 717,85
(X-M) (Miliar Rp)	-64 326,58	-111 406,38	-80 705,13	-8 724,05	-83 583,24
(X+M) (Miliar Rp)	603 147,11	705 263,99	657 691,00	643 778,54	761 852,45
RPI	-0,11	-0,16	-0,12	-0,01	-0,11

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor luar negeri Jawa Timur mengalami peningkatan dari 269.410,26 miliar rupiah (2017) menjadi 339.134,60 miliar rupiah (2021). Perkembangan impor luar negeri cenderung lebih berfluktuatif. Impor luar negeri meningkat dari 333.736,84 miliar rupiah (2017) menjadi 408.335,19 miliar rupiah (2018), kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya menjadi 369.198,07 miliar rupiah (2019) dan 326.251,30 miliar rupiah (2020). Nilai impor kembali menguat pada tahun 2021, dengan nilai sebesar 422.717,85 miliar rupiah.

4.10

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter Nilai Tambah.

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka dapat dijelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau dapat diartikan untuk setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Tabel 4. 10 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	1 482 299,58	1 563 441,82	1 649 895,64	1 611 507,78	1 669 116,89
Perubahan (Miliar Rp)	76 736,07	81 142,25	86 453,82	-38 387,86	57 609,11
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	407 185,35	431 922,41	453 188,70	433 793,01	439 369,17
ICOR	5,31	5,32	5,24	-11,30	7,63

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Nilai ICOR Jawa Timur selama tahun 2017 hingga 2019 berada pada kisaran 5,24 - 5,32 setiap tahunnya. Nilai ICOR pada tahun 2017 sebesar 5,31 kemudian meningkat menjadi 5,32 (2018) dan melambat menjadi 5,24 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai koefisien ICOR Jawa Timur bernilai negatif. Kondisi ini terjadi karena output yang dihasilkan selama tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan output yang dihasilkan pada tahun 2019, meskipun masih tercipta investasi fisik pada tahun 2020. Penurunan nilai output ini disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menghambat kinerja perekonomian Jawa Timur. Seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pada tahun 2021, terjadi penambahan output sehingga nilai ICOR kembali pada posisi positif sebesar 7,63.

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut Pengeluaran tahun 2017-2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri serta perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga) sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017-2021, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan dalam publikasi ini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Jawa Timur terhadap ekonomi negara/provinsi lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021/

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	1 193 915,05	1 298 390,49	1 396 604,49	1 398 516,77	1 455 393,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	381 192,22	411 206,86	439 313,24	462 688,97	492 938,65
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	45 547,85	49 575,01	52 441,89	52 392,35	54 900,45
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	129 730,29	138 995,49	147 248,22	154 836,57	163 062,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	88 895,11	96 193,85	102 575,29	110 725,10	113 377,41
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	289 653,29	319 376,28	349 084,75	298 905,74	294 898,12
1.f. Hotel dan Restoran	198 960,68	217 872,87	236 195,06	242 835,53	253 905,73
1.g. Lainnya	59 935,61	65 170,13	69 746,06	76 132,50	82 311,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	23 399,52	25 711,99	27 887,70	28 481,70	29 580,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a +3.b)	109 444,00	120 991,07	131 003,94	129 886,86	131 936,73
3.a. Konsumsi Kolektif	58 776,36	63 503,60	69 005,96	64 973,08	65 553,32
3.b. Konsumsi Individu	50 667,64	57 487,46	61 997,98	64 913,78	66 383,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a + 4.b)	568 965,37	620 630,33	669 990,88	647 892,96	666 538,94
4.a. Bangunan	453 713,97	495 958,98	537 710,50	518 027,50	533 249,40
4.b. Non Bangunan	115 251,40	124 671,35	132 280,38	129 865,45	133 289,54
5. Perubahan Inventori	25 943,94	28 393,47	29 135,15	11 805,01	21 610,99
6. Ekspor Luar Negeri (6.a + 6.b)	269 410,26	296 928,80	288 492,94	317 527,24	339 134,60
6.a. Barang	255 627,51	281 236,21	273 490,09	308 638,91	332 520,20
6.b. Jasa	13 782,75	15 692,60	15 002,84	8 888,33	6 614,40
7. Impor Luar Negeri (7.a + 7.b)	333 736,84	408 335,19	369 198,07	326 251,30	422 717,85
7.a. Barang	305 603,00	374 370,42	334 669,35	297 662,65	395 959,42
7.b. Jasa	28 133,84	33 964,77	34 528,71	28 588,65	26 758,43
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a - 8.b)	155 576,69	206 055,38	171 631,53	91 931,80	233 020,76
8.a. Ekspor	681 293,81	822 436,94	856 476,76	794 509,37	929 252,03
8.b. Impor	525 717,12	616 381,56	684 845,23	702 577,57	696 231,28
PDRB	2 012 917,99	2 188 766,35	2 345 548,55	2 299 791,05	2 454 498,80

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	884 011,66	926 783,86	971 393,49	963 365,95	989 274,32
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	278 262,75	290 495,87	302 493,25	314 178,18	328 173,53
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	34 547,78	35 801,50	37 211,66	36 800,45	37 685,35
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	102 885,35	106 943,99	110 924,77	114 517,10	118 147,66
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	60 282,45	62 793,02	65 279,30	69 299,67	69 627,71
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	230 443,74	245 460,93	260 930,71	229 884,20	230 987,23
1.f. Hotel dan Restoran	131 570,78	137 433,82	144 790,80	145 704,79	148 922,71
1.g. Lainnya	46 018,80	47 854,72	49 763,00	52 981,57	55 730,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14 540,18	15 494,99	16 419,71	16 456,71	16 796,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a +3.b)	67 574,95	70 757,28	73 889,18	71 538,78	71 976,43
3.a. Konsumsi Kolektif	37 225,51	39 215,56	41 296,57	38 202,28	38 154,34
3.b. Konsumsi Individu	30 349,43	31 541,73	32 592,61	33 336,50	33 822,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a + 4.b)	407 185,35	431 922,41	453 188,70	433 793,01	439 369,17
4.a. Bangunan	317 737,75	337 220,64	355 002,17	339 547,98	344 695,00
4.b. Non Bangunan	89 447,60	94 701,76	98 186,52	94 245,03	94 674,17
5. Perubahan Inventori	18 024,04	18 261,80	18 496,33	7 401,89	13 265,50
6. Ekspor Luar Negeri (6.a + 6.b)	198 101,30	209 977,09	209 165,11	230 446,47	234 152,60
6.a. Barang	189 390,88	200 350,31	200 166,54	224 779,16	229 878,55
6.b. Jasa	8 710,42	9 626,78	8 998,57	5 667,31	4 274,05
7. Impor Barang Luar Negeri (7.a + 7.b)	259 503,74	281 694,09	255 864,27	233 780,63	291 185,03
7.a. Barang	240 673,41	260 862,37	236 155,29	216 781,84	275 114,24
7.b. Jasa	18 830,33	20 831,72	19 708,98	16 998,79	16 070,79
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a - 8.b)	152 365,85	171 938,48	163 207,39	122 285,61	195 467,43
8.a. Ekspor	551 298,88	607 763,47	636 122,68	590 005,79	670 279,66
8.b. Impor	398 933,03	435 824,99	472 915,29	467 720,18	474 812,22
PDRB	1 482 299,58	1 563 441,82	1 649 895,64	1 611 507,78	1 669 116,89

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	59,31	59,32	59,54	60,81	59,29
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	18,94	18,79	18,73	20,12	20,08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,26	2,26	2,24	2,28	2,24
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,44	6,35	6,28	6,73	6,64
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,42	4,39	4,37	4,81	4,62
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,39	14,59	14,88	13,00	12,01
1.f. Hotel dan Restoran	9,88	9,95	10,07	10,56	10,34
1.g. Lainnya	2,98	2,98	2,97	3,31	3,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,17	1,19	1,24	1,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a +3.b)	5,44	5,53	5,59	5,65	5,38
3.a. Konsumsi Kolektif	2,92	2,90	2,94	2,83	2,67
3.b. Konsumsi Individu	2,52	2,63	2,64	2,82	2,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a + 4.b)	28,27	28,36	28,56	28,17	27,16
4.a. Bangunan	22,54	22,66	22,92	22,52	21,73
4.b. Non Bangunan	5,73	5,70	5,64	5,65	5,43
5. Perubahan Inventori	1,29	1,30	1,24	0,51	0,88
6. Ekspor Luar Negeri (6.a + 6.b)	13,38	13,57	12,30	13,81	13,82
6.a. Barang	12,70	12,85	11,66	13,42	13,55
6.b. Jasa	0,68	0,72	0,64	0,39	0,27
7. Impor Luar Negeri (7.a + 7.b)	16,58	18,66	15,74	14,19	17,22
7.a. Barang	15,18	17,10	14,27	12,94	16,13
7.b. Jasa	1,40	1,55	1,47	1,24	1,09
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a - 8.b)	7,73	9,41	7,32	4,00	9,49
8.a. Ekspor	33,85	37,58	36,51	34,55	37,86
8.b. Impor	26,12	28,16	29,20	30,55	28,37
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021y

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	4,51	4,84	4,81	-0,83	2,69
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,15	4,40	4,13	3,86	4,45
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,36	3,63	3,94	-1,11	2,40
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,65	3,94	3,72	3,24	3,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,68	4,16	3,96	6,16	0,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,18	6,52	6,30	-11,90	0,48
1.f. Hotel dan Restoran	4,41	4,46	5,35	0,63	2,21
1.g. Lainnya	4,43	3,99	3,99	6,47	5,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,35	6,57	5,97	0,23	2,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a +3.b)	3,58	4,71	4,43	-3,18	0,61
3.a. Konsumsi Kolektif	5,04	5,35	5,31	-7,49	-0,13
3.b. Konsumsi Individu	1,84	3,93	3,33	2,28	1,46
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a + 4.b)	5,29	6,08	4,92	-4,28	1,29
4.a. Bangunan	5,30	6,13	5,27	-4,35	1,52
4.b. Non Bangunan	5,27	5,87	3,68	-4,01	0,46
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a + 6.b)	-5,23	5,99	-0,39	10,17	1,61
6.a. Barang	-5,83	5,79	-0,09	12,30	2,27
6.b. Jasa	10,30	10,52	-6,53	-37,02	-24,58
7. Impor Luar Negeri (7.a + 7.b)	7,68	8,55	-9,17	-8,63	24,55
7.a. Barang	8,18	8,39	-9,47	-8,20	26,91
7.b. Jasa	1,62	10,63	-5,39	-13,75	-5,46
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a - 8.b)	-	-	-	-	-
8.a. Ekspor	19,31	10,24	4,67	-7,25	13,61
8.b. Impor	12,62	9,25	8,51	-1,10	1,52
PDRB	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	135,06	140,10	143,77	145,17	147,12
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	136,99	141,55	145,23	147,27	150,21
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	131,84	138,47	140,93	142,37	145,68
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	126,09	129,97	132,75	135,21	138,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	147,46	153,19	157,13	159,78	162,83
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	125,69	130,11	133,78	130,02	127,67
1.f. Hotel dan Restoran	151,22	158,53	163,13	166,66	170,49
1.g. Lainnya	130,24	136,18	140,16	143,70	147,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	160,93	165,94	169,84	173,07	176,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a +3.b)	161,96	170,99	177,30	181,56	183,31
3.a. Konsumsi Kolektif	157,89	161,93	167,10	170,08	171,81
3.b. Konsumsi Individu	166,95	182,26	190,22	194,72	196,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a + 4.b)	139,73	143,69	147,84	149,36	151,70
4.a. Bangunan	142,80	147,07	151,47	152,56	154,70
4.b. Non Bangunan	128,85	131,65	134,72	137,80	140,79
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a + 6.b)	136,00	141,41	137,93	137,79	144,83
6.a. Barang	134,97	140,37	136,63	137,31	144,65
6.b. Jasa	158,23	163,01	166,72	156,84	154,76
7. Impor Luar Negeri (7.a + 7.b)	128,61	144,96	144,29	139,55	145,17
7.a. Barang	126,98	143,51	141,72	137,31	143,93
7.b. Jasa	149,41	163,04	175,19	168,18	166,50
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a - 8.b)	-	-	-	-	-
8.a. Ekspor	123,58	135,32	134,64	134,66	138,64
8.b. Impor	131,78	141,43	144,81	150,21	146,63
PDRB	135,80	140,00	142,16	142,71	147,05

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran, 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 ^{*)}	2021 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	3,01	3,73	2,62	0,97	1,34
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,99	3,33	2,60	1,40	1,99
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,21	5,03	1,77	1,02	2,33
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,67	3,08	2,14	1,85	2,08
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,96	3,88	2,57	1,68	1,91
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,63	3,52	2,82	-2,81	-1,81
1.f. Hotel dan Restoran	3,32	4,83	2,90	2,17	2,30
1.g. Lainnya	3,14	4,56	2,92	2,53	2,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,12	3,11	2,35	1,90	1,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a +3.b)	5,10	5,58	3,69	2,40	0,96
3.a. Konsumsi Kolektif	9,02	2,56	3,19	1,78	1,02
3.b. Konsumsi Individu	1,09	9,17	4,37	2,37	0,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a + 4.b)	4,28	2,83	2,89	1,03	1,57
4.a. Bangunan	4,29	3,00	2,99	0,72	1,40
4.b. Non Bangunan	4,21	2,17	2,34	2,28	2,17
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a + 6.b)	7,47	3,98	-2,46	-0,10	5,11
6.a. Barang	7,34	4,00	-2,67	0,50	5,35
6.b. Jasa	7,71	3,02	2,28	-5,93	-1,32
7. Impor Luar Negeri (7.a + 7.b)	5,54	12,71	-0,46	-3,28	4,03
7.a. Barang	6,22	13,02	-1,25	-3,11	4,82
7.b. Jasa	-0,11	9,13	7,45	-4,00	-1,00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a - 8.b)	-	-	-	-	-
8.a. Ekspor	4,79	9,50	-0,50	0,02	2,95
8.b. Impor	7,22	7,32	2,39	3,73	-2,38
PDRB	2,85	3,09	1,55	0,38	3,04

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. , *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Jawa Timur Dalam Angka*, berbagai seri, Surabaya.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010-2035*, berbagai seri, Jakarta
6. , *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, berbagai seri, Surabaya.
8. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
12. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
13. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
14. *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
15. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
16. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
17. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
18. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
19. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
20. , *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

21. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
22. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
23. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
24. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
25. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

<https://jatim.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292
Telp. (031) 8439343, Fax (031) 8494007, 8471143
Email : bps3500@bps.go.id Website : <https://jatim.bps.go.id/>

